



Pengaruh Partai Sayap Kanan dalam Pelaksanaan Kebijakan *Muslim Ban*: Studi Komparasi Amerika Serikat, Australia, India, dan Denmark Periode 2017-2021

Marsaa Anindita

Universitas Brawijaya, Indonesia; email: marsaa.anindita@student.ub.ac.id

Adhi Cahya Fahadayna

Universitas Brawijaya, Indonesia; email: a.fahadayna@ub.ac.id

| Submit: 09-10-2024

| Accept: 18-11-2024

| Publish: 10-12-2024

Keywords

Australia, Denmark,
India, Muslim Ban,
United States

ABSTRACT

This study examines the influence of Right-Wing Parties on the implementation of the "Muslim Ban" policy in the United States, Australia, India, and Denmark, focusing on negative perceptions of Islam post-9/11. Using the concepts of Populism and Foreign Policy, along with comparative methods and multiple linear regression analysis, the research investigates factors such as public perceptions of Islam as a threat, national trauma, international immigration flows, and U.S. policy influence. The findings reveal that all Right-Wing Party variables significantly affect the Muslim Ban policy in the U.S., with the Claim of Leaders Representing the People being the most influential factor. In Australia, only the Use of Populist Issues shows near-significant influence, while in India and Denmark, no significant impact is observed. These findings highlight the complexity and variations in policy implementation and their implications for democracy and the treatment of Muslim communities across these nations.

Kata Kunci

Amerika Serikat,
Australia, Denmark,
India, Muslim Ban

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pengaruh Partai Sayap Kanan terhadap kebijakan "Muslim Ban" di AS, Australia, India, dan Denmark, dengan fokus pada persepsi negatif terhadap Islam pasca 9/11. Menggunakan konsep Populisme dan Kebijakan Luar Negeri serta metode komparatif dan analisis regresi linear berganda, penelitian ini mengkaji faktor-faktor seperti persepsi ancaman terhadap Islam, trauma nasional, arus imigrasi, dan pengaruh AS. Hasilnya menunjukkan semua variabel Partai Sayap Kanan signifikan di AS, dengan Klaim Pemimpin Mewakili Rakyat sebagai faktor utama. Di Australia, hanya Penggunaan Isu Populis yang mendekati signifikan, sementara di India dan Denmark tidak ditemukan pengaruh signifikan. Temuan ini menyoroti perbedaan dalam penerapan kebijakan dan implikasinya bagi demokrasi dan komunitas Muslim di negara-negara tersebut.

PENDAHULUAN

Konflik global terus berkembang dan semakin kompleks. Salah satu isu yang menonjol adalah pandangan negatif terhadap Islam yang kerap dianggap sebagai sumber konflik. Di Amerika Serikat (AS), hasil survei dari *Pew Research* pada 2017 menunjukkan bahwa lebih dari 41 persen masyarakat Amerika memandang Islam sebagai agama yang mendorong terorisme dan kekerasan. Hal itu didukung dengan adanya pengakuan warga negara muslim sebanyak 48 persen menyatakan bahwa secara pribadi mendapatkan tindak diskriminasi (BBC, 2019).

Tidak hanya di AS, pandangan serupa juga ditemukan di beberapa negara Eropa yang menganggap bahwa kekerasan dalam komunitas Muslim bukan hanya bersifat individual, tetapi juga tertanam dalam pendidikan mereka. Hal ini diperkuat dengan data yang menunjukkan peningkatan pelecehan terhadap umat Muslim di AS sebesar 36 persen pada 2016. Selain itu, banyak yang beranggapan bahwa Islam tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi karena dianggap memaksakan unsur agama dalam pemerintahan. Hal ini kemudian memperkuat pandangan bahwa Islam menentang kebebasan dalam sistem demokrasi (Aulia, dkk, 2022).

Di sisi lain, demokrasi menuntut setiap negara untuk menjamin kebebasan individu, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan dalam memilih keyakinan, dan kebebasan dari perlakuan diskriminatif. AS sebagai negara demokrasi pertama di dunia, menegaskan prinsip-prinsip tersebut di dalam konstitusinya dengan jaminan keadilan dan kesetaraan bagi semua warganya. Namun, realita yang terjadi sering kali bertentangan dengan prinsip tersebut, terutama terkait dengan perlakuan terhadap komunitas Muslim pasca peristiwa 9/11. Serangan teroris pada 11 September 2001 yang dilakukan oleh kelompok teroris Islam Sunni Al-Qaeda memicu pembuatan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan luar negeri yang sangat mempengaruhi persepsi global terhadap Islam. Salah satu kebijakan yang diambil oleh Presiden Donald Trump pada 2017 adalah "*Muslim Ban*", yaitu sebuah kebijakan yang melarang masuknya imigran dari beberapa negara mayoritas Muslim seperti Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman. Kebijakan yang didasarkan pada perintah eksekutif Nomor 13769 ini dianggap kontroversial karena bertentangan dengan prinsip demokrasi AS yang menjamin hak setiap individu untuk bebas dari diskriminasi (Aulia, dkk, 2022).

Selain faktor keamanan nasional, Donald Trump juga didorong oleh faktor internal dan eksternal dalam mengambil kebijakan ini. Trauma akibat peristiwa 9/11 menciptakan opini publik yang menyalahkan komunitas Muslim sebagai pihak yang bertanggung jawab, sehingga kebijakan ini mendapat dukungan dari sebagian masyarakat AS. Trump juga berupaya memperkuat pertahanan dan keamanan AS dengan mengontrol arus imigrasi, khususnya imigran Muslim, yang dianggapnya sebagai potensi ancaman. Di samping itu, peningkatan arus imigrasi internasional secara global menjadi salah satu faktor eksternal yang mendorong Trump untuk membatasi masuknya imigran ke AS. Kebijakan ini tidak hanya berdampak di AS, tetapi juga mempengaruhi negara lain, seperti, Australia, India, dan Denmark yang mulai memikirkan penerapan kebijakan serupa untuk membatasi atau mengontrol populasi Muslim di negara mereka (Novrizza, 2021).

Memiliki pandangan yang sama dengan Trump, politikus Australia seperti Pauline Hanson secara terang-terangan menyuarakan pandangan anti-Islamnya dengan mengusulkan penghentian imigrasi umat Muslim dan pelarangan burka (Tribunnews, 2019). Dukungan untuk kebijakan ini juga datang dari anggota parlemen seperti George Christensen. Ia

menyatakan bahwa kebangkitan imigran Muslim di Australia dapat membawa pengaruh buruk karena tingginya kekerasan yang disebabkan oleh ekstremisme dan radikalisme. Di India, setelah serangan bom di Kashmir, Perdana Menteri Narendra Modi mengesahkan Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (CAA), yang memberikan kewarganegaraan kepada imigran non-Muslim dari Afghanistan, Pakistan, dan Bangladesh. Hal ini menimbulkan kesan bahwa kebijakan ini bersifat diskriminatif terhadap umat Muslim (CNBC Indonesia, 2019).

Sementara itu, di Denmark, Menteri Imigrasi dan Integrasi Mattias Tesfaye menggolongkan imigran Muslim sebagai pelaku kejahatan, khususnya mereka yang berasal dari Timur Tengah dan Afrika Utara, serta keturunan Pakistan dan Turki. Kebijakan ini dilandasi oleh temuan statistik yang menunjukkan bahwa kelompok-kelompok tersebut memiliki tingkat pengangguran dan kriminalitas yang tinggi (Khazanah, 2020). Kualitas demokrasi di negara-negara yang menerapkan kebijakan diskriminatif terhadap komunitas Muslim sering kali dipertanyakan karena kebijakan-kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Di antaranya, prinsip kebebasan beragama, keadilan, dan kesetaraan di hadapan hukum. Negara-negara yang mengklaim menjunjung tinggi demokrasi namun mengadopsi kebijakan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok minoritas, khususnya komunitas Muslim, menunjukkan adanya ketegangan antara retorika demokrasi dan praktik politik nyata. Dalam banyak kasus, kebijakan semacam ini didasarkan pada stereotip negatif tentang Islam dan komunitas Muslim yang dipandang tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, padahal seharusnya prinsip demokrasi mencakup penghormatan terhadap keberagaman dan perlindungan hak-hak minoritas.

Tantangan dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan keadilan di tengah masyarakat yang semakin multikultural terus menjadi isu global yang memerlukan perhatian serius. Kebijakan diskriminatif, seperti larangan terhadap komunitas Muslim (*Muslim Ban*), mengancam fondasi demokrasi yang sehat karena kebijakan tersebut tidak hanya menciptakan ketidaksetaraan, tetapi juga memperkuat prasangka sosial dan budaya yang memecah belah masyarakat. Di sisi lain, negara yang mampu mempertahankan demokrasi yang inklusif dan menjamin hak-hak semua warga negara, termasuk komunitas Muslim, menunjukkan bahwa pluralisme dan keberagaman adalah aset yang dapat memperkuat stabilitas sosial dan politik.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan perbandingan implementasi kebijakan *Muslim Ban* di Amerika Serikat, Australia, India, dan Denmark selama periode 2017-2021 sesuai dengan masa berlakunya kebijakan tersebut di AS. Berbagai kebijakan tersebut diadopsi dalam konteks yang berbeda, dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, dan budaya masing-masing negara. Namun, melalui perbandingan ini, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pola yang sama dan berbeda dalam penerapan kebijakan *Muslim Ban* serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi di keempat negara tersebut.

Amerika Serikat, dengan warisan demokrasinya yang panjang, menghadapi kritik tajam karena kebijakan *Muslim Ban* di bawah pemerintahan Trump yang menargetkan sejumlah negara mayoritas Muslim. Di Australia, kebijakan imigrasi yang ketat dan sikap populis terhadap imigran memperkuat diskriminasi terhadap kelompok Muslim. Sementara itu, di India, kebijakan-kebijakan yang bias terhadap komunitas Muslim seringkali dipengaruhi oleh sentimen politik domestik yang kompleks. Di Denmark, kebijakan imigrasi yang ketat dan

retorika populis seringkali menjadi alasan utama munculnya kebijakan yang diskriminatif terhadap Muslim.

Dengan mengangkat rumusan masalah tentang bagaimana penerapan kebijakan diskriminatif tersebut di keempat negara, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak kebijakan *Muslim Ban* terhadap kualitas demokrasi di setiap negara. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan mengenai cara-cara di mana kebijakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas, khususnya komunitas Muslim, dapat memperburuk ketegangan sosial dan memperlentah demokrasi.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya studi di bidang Ilmu Hubungan Internasional, terutama terkait dengan bagaimana kebijakan diskriminatif memengaruhi dinamika politik dalam masyarakat multikultural. Pemahaman ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan diskriminatif diterapkan. Selain itu, untuk mengembangkan strategi yang dapat membantu negara-negara tersebut kembali kepada prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan adil.

Dari segi manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih adil terhadap komunitas Muslim dan membantu mengurangi diskriminasi berbasis agama. Kebijakan *Muslim Ban* tidak hanya berdampak pada mereka yang terkena dampaknya secara langsung, tetapi juga menciptakan atmosfer ketidakpercayaan dan kebencian yang dapat merusak kohesi sosial di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara demokratis untuk meninjau kembali kebijakan-kebijakan tersebut dan mengevaluasi dampaknya terhadap demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi memperluas wawasan masyarakat tentang kebijakan-kebijakan *Muslim Ban* di berbagai negara agar lebih kritis terhadap kebijakan yang diskriminatif dan lebih mendukung pendekatan inklusif.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi yang penting dalam memahami kompleksitas hubungan antara kebijakan diskriminatif terhadap komunitas Muslim dan kualitas demokrasi di negara-negara yang mengadopsi kebijakan tersebut. Dengan memahami penerapan kebijakan ini dan dampaknya terhadap masyarakat, kita dapat mengeksplorasi berbagai cara untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi yang menghormati hak-hak semua individu tanpa memandang latar belakang agama atau etnis mereka.

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan studi komparasi kebijakan *Muslim Ban* di AS, Australia, Denmark, dan India adalah Jurnal Nasional yang berjudul “*United States Government Policy Against Migrants*” yang menggunakan studi komparatif untuk membandingkan kebijakan yang dilakukan pada masa kepemimpinan Donald Trump dan Joe Biden, serta dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami kompleksitas kebijakan diskriminatif terhadap kelompok Muslim dan implikasinya bagi kualitas demokrasi di AS. Menurut Mukaromah, Muzani dan Zid (2022), pada masa Presiden Donald Trump, kebijakan seperti *Muslim Ban* yang tertuang dalam perintah eksekutif Nomor 13769 secara jelas melarang adanya arus imigrasi dari negara-negara mayoritas Muslim, yang semakin memperkuat stigma buruk terhadap kelompok Muslim di masyarakat AS. Kebijakan ini juga memicu banyak kritik karena dianggap melanggar prinsip kebebasan beragama dan kesetaraan hukum, yang merupakan landasan dari demokrasi AS. Dengan adanya *Muslim Ban*, kelompok minoritas Muslim menjadi rentan terhadap diskriminasi, sementara publik secara umum semakin terpolarisasi mengenai isu imigrasi dan keamanan nasional. Hal ini mengindikasikan

bagaimana kebijakan pemerintah dapat membentuk persepsi publik dan berpengaruh pada nilai-nilai demokrasi.

Setelah Joe Biden menjabat sebagai presiden, kebijakan *Muslim Ban* ini segera dibatalkan sebagai upaya awal dalam mengurangi diskriminasi dan memulihkan komitmen AS pada kesetaraan rasial dan kebebasan beragama. Biden juga mengeluarkan memorandum anti-rasisme dan inisiatif yang menargetkan para *xenophobic* untuk mendukung komunitas Muslim dan minoritas lainnya. Namun, meskipun terdapat perubahan kebijakan di tingkat eksekutif, tantangan berupa diskriminasi terhadap Muslim di AS masih signifikan. Tingginya laporan diskriminasi dan stigma buruk terhadap komunitas Muslim menunjukkan bahwa kebijakan yang inklusif memerlukan dukungan sosial dan perubahan dalam persepsi publik untuk benar-benar efektif. Penelitian ini, dengan demikian, membuka peluang untuk mengeksplorasi strategi kebijakan yang tidak hanya berbasis hukum, tetapi juga berfokus pada edukasi masyarakat untuk memperkuat demokrasi yang lebih inklusif dan menghormati hak-hak seluruh warga.

Penelitian ini juga mengacu pada kajian Thomas Greven (2016) yang berjudul "*A Comparative Perspective: The Rise of Right-Wing Populism in Europe and The United States.*" Dalam artikel tersebut, Greven membahas perbedaan dan persamaan populisme sayap kanan di Eropa dan AS. Ia berpendapat bahwa populisme sayap kanan cenderung mendefinisikan masyarakat secara homogen, yakni dengan mengutamakan kepentingan bersama yang dianggap sebagai "akal sehat". Sementara itu, kepentingan kelompok minoritas seperti imigran dilihat sebagai ancaman. *Xenophobia* dan penolakan terhadap "yang lain" bertujuan menggulingkan sistem demokrasi karena adanya kecenderungan partai-partai Populis Sayap Kanan untuk bertindak lebih ekstrem.

KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dirancang untuk memahami dan menganalisis hubungan antara faktor-faktor Partai Sayap Kanan yang mempengaruhi kebijakan *Muslim Ban* di negara-negara seperti AS, Australia, India, dan Denmark. Kebijakan ini lahir dari berbagai dinamika politik, sosial, dan budaya yang dipengaruhi oleh persepsi terhadap Islam serta kondisi internal dan eksternal yang terjadi di setiap negara. Kerangka ini akan membantu menjelaskan hubungan antara keterlibatan variabel-variabel independen Partai Sayap Kanan terhadap variabel dependen, yaitu kebijakan *Muslim Ban* di berbagai negara yang dipengaruhi oleh konteks global dan lokal.

Populisme, khususnya Populisme Sayap Kanan merupakan fenomena politik yang semakin mendapat perhatian di berbagai negara. Partai-partai dan pemimpin yang menganut ideologi populisme sayap kanan sering kali menggunakan retorika yang menggambarkan diri mereka sebagai perwakilan rakyat "asli" atau mayoritas, yakni dengan pandangan yang menekankan eksklusivitas dan penolakan terhadap kelompok minoritas. Dalam konteks ini, populisme sayap kanan sering diiringi dengan ideologi-ideologi nativisme, otoritarianisme, dan nasionalisme ekstrem. Salah satu aspek penting dari populisme sayap kanan adalah bagaimana mereka membangun narasi yang memperkuat klaim bahwa mereka berbicara atas nama rakyat banyak. Sementara itu, minoritas dianggap sebagai ancaman atau penghalang bagi kemakmuran dan kestabilan masyarakat (Mudde, dkk, 2021).

Populisme adalah sebuah fenomena politik yang dapat dipahami dari berbagai sudut pandang, yaitu, sebagai ideologi, gerakan sosial, dan sindrom politik. Meskipun berakar pada isu-isu yang bervariasi, populisme seringkali disamakan karena kecenderungannya untuk memanfaatkan perasaan ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang ada (Mudde, dkk, 2017). Pada dasarnya, populisme mengklaim bahwa rakyat (*the people*) adalah kelompok yang murni dan adil, sementara elite dianggap sebagai kelompok yang korup dan tidak mewakili kepentingan rakyat. Dalam demokrasi, populisme sering berfungsi sebagai sarana mobilisasi politik yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam pembuatan kebijakan.

Menurut Goodwyn, populisme adalah kekuatan positif yang tidak hanya mampu memobilisasi masyarakat, tetapi juga mengembangkan model demokrasi komunitarian di mana masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam pengambilan keputusan politik (Mudde, dkk, 2021). Lebih jauh, Laclau dan Mouffe menyatakan bahwa populisme tidak hanya bersifat esensial sebagai gerakan politik, tetapi juga memiliki sifat emansipatoris, yaitu mampu memaksa perubahan sosial dan politik yang signifikan. Populisme seringkali muncul sebagai tanggapan terhadap ketidakpuasan publik terhadap sistem politik yang ada, khususnya dalam konteks demokrasi liberal.

Dalam hal ini, demokrasi liberal dianggap gagal memahami sifat dasar dari politik yang selalu penuh dengan klaim-klaim yang bersaing. Oleh karena itu, mereka menyarankan pendekatan demokrasi radikal sebagai solusi yang lebih efektif, di mana populisme berperan dalam memperjuangkan suara rakyat yang merasa tidak terwakili oleh elite politik.

METODE RISET

Penelitian ini menggunakan metode komparatif yang bertujuan untuk membandingkan penerapan kebijakan *Muslim Ban* di Amerika Serikat, Australia, India, dan Denmark selama periode 2017-2021. Melalui pendekatan ini, penelitian ini berusaha mengungkap perbedaan dan kesamaan dalam penerapan kebijakan tersebut di setiap negara, yaitu dengan memperhatikan berbagai variabel politik dan sosial yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Dengan menggunakan metode komparatif dapat menganalisis secara deskriptif serta mengeksplorasi secara mendalam faktor-faktor ideologi, kepemimpinan politik, dan wacana populisme dalam mempengaruhi keputusan pemerintah menerapkan kebijakan imigrasi yang kontroversial seperti *Muslim Ban*.

Dalam melakukan analisis yang lebih terperinci, penelitian ini menggunakan regresi linear berganda, yaitu sebuah teknik statistik yang dirancang untuk mengukur hubungan dan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan ini peneliti dapat mengukur seberapa besar pengaruh antara variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Adapun variabel independen yang penulis gunakan, yaitu X_1 (Persamaan Ideologi), X_2 (Klaim Pemimpin Mewakili Rakyat) dan X_3 (Penggunaan Isu Populis) yang berpengaruh terhadap variabel dependen Y (Kebijakan Muslim Ban). Diterimanya pengujian persamaan regresi linear berganda dapat dikatakan diterima jika, H_0 sebesar $> 0,05$ dan H_a ditolak jika data yang dihasilkan menunjukkan $< 0,05$. Analisis di atas dapat dijabarkan melalui persamaan sebagai berikut,

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Y	= <i>Muslim Ban</i> (Variabel Dependen)
. α	= Konstanta
$\beta_1 X_1$	= Koefisien regresi X_1 (Persamaan ideologi)
$\beta_2 X_2$	= Koefisian regresi X_2 (Klaim Pemimpin mewakili rakyat)
$\beta_3 X_3$	= Koefisien regresi X_3 (Penggunaan isu populis)
. e	= Nilai residu

Variabel independen yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi persamaan ideologi di antara partai politik dan kelompok masyarakat, klaim pemimpin politik yang menyatakan diri sebagai representasi rakyat, serta penggunaan isu populis dalam retorika politik. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kebijakan *Muslim Ban*, yang diukur berdasarkan bentuk dan tingkat penerapannya di keempat negara tersebut. Selain itu, sebelum masuk ke dalam pengujian regresi linear berganda, penelitian ini melakukan serangkaian uji hipotesis untuk memenuhi syarat validitas dan reliabilitas sebuah variabel.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui sumber sekunder yang mencakup berbagai jenis dokumen dan literatur. Data diperoleh dari studi pustaka yang melibatkan buku-buku ilmiah, artikel jurnal, dokumen resmi pemerintahan, serta data statistik yang diambil dari situs-situs terpercaya, seperti, *Varieties of Democracy (V-Dem)* dan *Our World in Data*. Data ini kemudian dianalisis secara kuantitatif menggunakan *Statistical Package for the Social Science (SPSS)* untuk mendapatkan gambaran empiris tentang variabel politik dan sosial yang mempengaruhi kebijakan di masing-masing negara.

Melalui pendekatan komparatif dan teknik statistik yang terstruktur, penelitian ini bertujuan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kebijakan *Muslim Ban* dirancang dan diterapkan di berbagai negara. Dengan mengeksplorasi peran persamaan ideologi politik, klaim pemimpin mewakili rakyat, dan penggunaan isu populis. Penelitian ini membantu mengungkap dinamika yang mendasari kebijakan kontroversial ini. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara politik identitas, kebijakan imigrasi, dan implikasi sosial yang timbul dari penerapan kebijakan-kebijakan tersebut di berbagai negara, khususnya kebijakan *Muslim Ban* yang diterapkan oleh Partai Sayap Kanan di suatu negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1. Hasil Pengolahan Data Regresi Linear Berganda Amerika Serikat

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Unstandardized Coefficients Std. Error			
1	(Constant)	255.357	.002		165063.790	.000
	Persamaan Ideologi	-.001	.000	-.217	-279.128	.002
	Klaim Pemimpin Mewakili Rakyat	.022	.000	.544	671.048	.001
	Penggunaan Isu Populis	-.012	.000	-.532	-651.644	.001

a. Dependent Variable: *Muslim Ban*

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai konstanta (B) sebesar 255.357 menggambarkan titik potong pada sumbu Y, di mana jika semua variabel independen Partai Sayap Kanan AS, yaitu, Persamaan Ideologi, Klaim Pemimpin Mewakili Rakyat, dan Penggunaan Isu Populis bernilai nol, maka *Muslim Ban* diprediksi bernilai 255.357.

Untuk variabel Persamaan Ideologi (X1), koefisien regresi sebesar -0.001 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit dalam Persamaan Ideologi akan menyebabkan penurunan *Muslim Ban* sebesar 0.001 satuan, dengan nilai t sebesar -279.128 dan Sig sebesar 0.002, yang menunjukkan hubungan signifikan pada tingkat kepercayaan sebesar 5%.

Sementara itu, variabel Klaim Pemimpin Mewakili Rakyat (X2) memiliki koefisien regresi sebesar 0.022, yang berarti setiap kenaikan 1 unit dalam variabel ini akan meningkatkan *Muslim Ban* sebesar 0.022 satuan; nilai t sebesar 671.048 dan Sig sebesar 0.001 menunjukkan pengaruh signifikan terhadap *Muslim Ban*.

Pada variabel Penggunaan Isu Populis (X3), koefisien regresi sebesar -0.012 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit dalam penggunaan isu ini akan menurunkan *Muslim Ban* sebesar 0.012 satuan, dengan nilai t sebesar -651.644 dan Sig sebesar 0.001 yang juga menunjukkan signifikansi.

Dari analisis *standardized coefficients* (Beta), Klaim Pemimpin Mewakili Rakyat sebesar 0.544 yang memiliki pengaruh terbesar terhadap *Muslim Ban* dibandingkan dengan variabel lainnya. Semua variabel independen memiliki nilai Sig < 0.05, yang mengindikasikan bahwa ketiga variabel ini secara signifikan mempengaruhi *Muslim Ban*.

Kesimpulannya, Klaim Pemimpin Mewakili Rakyat memiliki pengaruh positif dan terbesar terhadap *Muslim Ban*. Sedangkan Persamaan Ideologi dan Penggunaan Isu Populis berpengaruh negatif, di mana ketiga variabel independen tersebut memiliki kontribusi signifikan terhadap *Muslim Ban* pada tingkat signifikansi 5%.

Tabel 2. Hasil Pengolahan Data Regresi Linear Berganda Australia

Model		Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	13.389	4.408			3.037	.202
	Persamaan Ideologi	.002	.000	.353	6.160	.102	
	Klaim Pemimpin Mewakili Rakyat	.111	.081	.109	1.364	.403	
	Penggunaan Isu Populis	-.022	.002	-.650	-11.396	.056	

a. Dependent Variable: Muslim Ban

Berdasarkan analisis, nilai konstanta (B) menunjukkan sebesar 13.389 ketika semua variabel independen, yaitu Partai Sayap Kanan Australia yang terdiri dari variabel Persamaan Ideologi, Klaim Pemimpin Mewakili Rakyat, dan Penggunaan Isu Populis bernilai nol. Namun, nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0.202 menunjukkan bahwa konstanta ini tidak signifikan secara statistik karena nilainya lebih besar dari 0.05.

Pada variabel Persamaan Ideologi (X1), koefisien (B) sebesar 0.002 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam Persamaan Ideologi akan meningkatkan *Muslim Ban*

sebesar 0.002, yakni dengan *standardized coefficients* (Beta) sebesar 0.353 yang menunjukkan kekuatan hubungan standar antara Persamaan Ideologi dan *Muslim Ban*. Akan tetapi, nilai t sebesar 6.160 dan Sig. sebesar 0.102 menunjukkan bahwa hubungan ini tidak signifikan secara statistik.

Untuk variabel Klaim Pemimpin Mewakili Rakyat (X2), koefisien (B) sebesar 0.111 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit akan meningkatkan *Muslim Ban* sebesar 0.111, yakni dengan *standardized coefficients* (Beta) sebesar 0.109. Nilai t sebesar 1.364 dan Sig. sebesar 0.403 menunjukkan bahwa variabel ini juga tidak signifikan.

Sebaliknya, pada variabel Penggunaan Isu Populis (X3), koefisien (B) sebesar -0.022 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam Penggunaan Isu Populis akan mengurangi *Muslim Ban* sebesar 0.022. Dengan *standardized coefficients* (Beta) sebesar -0.650 menunjukkan kekuatan hubungan negatif yang signifikan. Nilai t sebesar -11.396 dan Sig. sebesar 0.056 menunjukkan bahwa variabel ini mendekati signifikansi, meskipun masih berada di ambang batas.

Kesimpulannya, dari ketiga variabel independen Partai Sayap Kanan Australia, Penggunaan Isu Populis adalah satu-satunya yang mendekati signifikansi. Sedangkan Persamaan Ideologi dan Klaim Pemimpin Mewakili Rakyat tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap *Muslim Ban* di Australia. Secara keseluruhan, model ini menunjukkan bahwa Penggunaan Isu Populis berpotensi mempengaruhi *Muslim Ban*, meskipun signifikansinya masih belum kuat.

Tabel 3. Hasil Pengolahan Data Regresi Linear Berganda India

Model	Coefficients^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error				
1	(Constant)	-471.507	555.235		-.849	.552
	Persamaan Ideologi	-.052	.037	-1.167	-1.408	.393
	Klaim Pemimpin Mewakili Rakyat	10.747	10.964	1.123	.980	.506
	Penggunaan Isu Populis	.109	.127	1.209	.862	.547

a. Dependent Variable: Muslim Ban

Berdasarkan analisis, nilai konstanta (B) sebesar -471.507 menunjukkan bahwa jika semua variabel independen, yaitu Partai Sayap Kanan India yang meliputi variabel Persamaan Ideologi, Klaim Pemimpin Mewakili Rakyat, dan Penggunaan Isu Populis bernilai nol, maka nilai prediksi untuk variabel dependen *Muslim Ban* adalah -471.507. Akan tetapi, nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0.552 lebih besar dari 0.05, yang menunjukkan bahwa konstanta ini tidak signifikan secara statistik.

Pada variabel Persamaan Ideologi (X1), koefisien (B) sebesar -0.052 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam Persamaan Ideologi akan menurunkan nilai *Muslim Ban* sebesar 0.052 dengan hipotesis bahwa variabel lain tetap konstan. Dalam hal ini, nilai t sebesar -1.408 dan Sig. sebesar 0.393 menunjukkan bahwa pengaruh Persamaan Ideologi terhadap *Muslim Ban* tidak signifikan.

Untuk variabel Klaim Pemimpin Mewakili Rakyat (X2), koefisien (B) sebesar 10.747 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam variabel ini akan meningkatkan nilai *Muslim Ban* sebesar 10.747. Namun, nilai t sebesar 0.980 dan Sig. sebesar 0.506 juga menunjukkan bahwa pengaruhnya tidak signifikan. Sedangkan pada variabel Penggunaan Isu Populis (X3), koefisien (B) sebesar 0.109 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam variabel ini akan meningkatkan nilai *Muslim Ban* sebesar 0.109. Akan tetapi, dengan nilai t sebesar 0.862 dan Sig. sebesar 0.547, variabel ini juga tidak signifikan dalam mempengaruhi *Muslim Ban*.

Kesimpulannya, tidak ada variabel independen Partai Sayap Kanan India yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen *Muslim Ban*. Karena nilai Sig. dari semua variabel lebih besar dari 0.05, maka hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap model yang diuji.

Tabel 4. Hasil Pengolahan Data Regresi Linear Berganda Denmark

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-22.475	54.716			-.411	.752
	Persamaan Ideologi	.015	.015	1.332	1.000	.500	
	Klaim Pemimpin Mewakili Rakyat	.785	.912	.503	.861	.548	
	Penggunaan Isu Populis	.026	.049	.830	.531	.689	

a. Dependent Variable: Muslim Ban

Berdasarkan analisis, nilai konstanta (B) sebesar -22.475 menunjukkan bahwa jika semua variabel independen Partai Sayap Kanan Denmark, yaitu, variabel Persamaan Ideologi, Klaim Pemimpin Mewakili Rakyat, dan Penggunaan Isu Populis bernilai nol, maka nilai prediksi untuk variabel dependen *Muslim Ban* adalah -22.475. Namun, nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0.752, yang lebih besar dari 0.05 menunjukkan bahwa konstanta ini tidak signifikan secara statistik.

Untuk variabel Persamaan Ideologi (X1), koefisien (B) sebesar 0.015 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam Persamaan Ideologi akan meningkatkan nilai *Muslim Ban* sebesar 0.015 dengan hipotesis bahwa variabel lain tetap konstan. Nilai t sebesar 1.000 dan Sig. sebesar 0.500 menunjukkan bahwa pengaruh Persamaan Ideologi terhadap *Muslim Ban* tidak signifikan.

Selanjutnya, untuk variabel Klaim Pemimpin Mewakili Rakyat (X3), maka koefisien (B) sebesar 0.785 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam variabel ini akan meningkatkan nilai *Muslim Ban* sebesar 0.785. Namun, nilai t sebesar 0.861 dan Sig. sebesar 0.548 juga menunjukkan bahwa pengaruhnya tidak signifikan.

Terakhir, pada variabel Penggunaan Isu Populis (X3), jika koefisien (B) sebesar 0.026 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam variabel ini akan meningkatkan nilai *Muslim Ban* sebesar 0.026. Dengan nilai t sebesar 0.531 dan Sig. sebesar 0.689, variabel ini juga tidak signifikan dalam mempengaruhi *Muslim Ban*. Secara keseluruhan, tidak ada variabel

independen Partai Sayap Kanan Denmark yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen *Muslim Ban* karena semua nilai Sig. dari variabel independen lebih besar dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap model yang diuji.

Pembahasan

Partai-partai sayap kanan populis sering memanfaatkan polarisasi masyarakat dengan mengedepankan isu-isu identitas yang memisahkan kelompok mayoritas dari minoritas, baik itu berdasarkan ras, agama, atau status sosial. Dalam banyak kasus, ideologi mereka mencakup gagasan nativisme, yaitu keyakinan bahwa negara harus dipertahankan oleh penduduk asli atau kelompok mayoritas, dan bahwa minoritas atau imigran dianggap sebagai ancaman bagi kebudayaan dan identitas nasional. Ideologi otoritarian juga memainkan peran penting, di mana pemimpin populis cenderung mempromosikan kontrol yang lebih kuat terhadap masyarakat melalui kebijakan yang bersifat represif atau otoriter. Selain itu, pandangan populis ini mengarah pada pemberian terhadap struktur sosial, politik, dan ekonomi yang menempatkan kelompok mayoritas dalam posisi dominan, sementara hak-hak minoritas diabaikan atau dipinggirkan.

Salah satu ciri khas dari populisme sayap kanan adalah klaim bahwa pemimpin atau partai yang berkuasa benar-benar mewakili suara rakyat. Pemimpin populis sering menggunakan narasi yang menyatakan bahwa mereka adalah satu-satunya yang memahami kehendak rakyat dan bahwa mereka memiliki mandat untuk memperbaiki ketidakadilan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh kelompok mayoritas. Klaim ini seringkali disertai dengan retorika anti-elit, di mana elite politik atau kelompok minoritas dianggap sebagai pengkhianat atau sumber masalah bagi rakyat.

Di beberapa negara, pemimpin Populis Sayap Kanan juga sering menggunakan retorika anti-Muslim atau *xenophobia* untuk memperkuat dukungan politik, yakni dengan mengandalkan ketakutan dan prasangka terhadap imigran atau kelompok minoritas agama. Untuk menilai apakah pemimpin populis benar-benar berhasil mewakili rakyat, salah satu indikator yang digunakan adalah tingkat keterpilihan pemimpin tersebut di tingkat pemerintahan lokal, atau *local government elected* yang dapat menunjukkan sejauh mana pemimpin populis diterima oleh masyarakat luas (Henley, 2022).

Isu-isu populis sering kali dimanfaatkan oleh partai-partai sayap kanan untuk menarik dukungan dari kalangan mayoritas. Pemimpin populis cenderung mengangkat isu-isu yang dianggap relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat mayoritas, seperti, ketidakpuasan terhadap kondisi sosio-ekonomi, krisis identitas, dan perlawanan terhadap rezim yang mapan. Dalam hal ini, retorika populis sering kali menargetkan kebijakan imigrasi, hak-hak minoritas, dan peran agama dalam kehidupan publik sebagai bagian dari narasi yang lebih besar tentang perlindungan identitas nasional. Indikator lain yang sering digunakan untuk menganalisis pengaruh populisme sayap kanan adalah tingkat pidato kebencian (*hate speech*) dari partai politik. Hal ini mencerminkan sejauh mana partai-partai politik menggunakan retorika yang bersifat memecah belah dan mempengaruhi wacana publik serta kohesi sosial di negara tersebut (Anditya, 2019).

Secara keseluruhan, Populisme Sayap Kanan tidak hanya mempengaruhi politik elektoral, tetapi juga dinamika sosial dan ekonomi di banyak negara. Dengan mengandalkan isu-isu yang sering kali kontroversial dan polarisasi masyarakat, partai dan pemimpin populis berupaya memperkuat posisi mereka di panggung politik dengan mengklaim diri mereka sebagai satu-satunya perwakilan sejati dari "rakyat" mayoritas. Sementara itu, hak-hak minoritas sering kali diabaikan, dan polarisasi antara kelompok mayoritas maupun minoritas semakin diperkuat oleh ideologi nasionalisme ekstrem, nativisme, dan otoritarianisme yang menjadi ciri khas Populisme Sayap Kanan.

Kebijakan luar negeri merupakan aktivitas dan hubungan eksternal yang direncanakan oleh seorang pemimpin dalam suatu sistem pemerintahan negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Kebijakan luar negeri melibatkan strategi yang berangkat dari tujuan atau masalah yang sedang dihadapi oleh negara tersebut dengan menggunakan latar belakang yang berasal dari isu tertentu di dunia internasional dan aspek historis dari negaranya (Iskandar, dkk, 2022).

Menurut Ibabs (2020), Alexander Wendt, sebagai salah satu tokoh utama dalam teori konstruktivisme, berpendapat bahwa struktur internasional tidak hanya terbentuk dari kekuatan material, tetapi juga oleh ide, norma, dan persepsi yang ada di antara negara-negara. Wendt mengemukakan bahwa "*anarki adalah apa yang dibuat oleh negara-negara*" ("anarchy is what states make of it"), yang artinya, situasi internasional ditentukan oleh bagaimana negara-negara memilih untuk memandang satu sama lain, bukan hanya oleh kondisi anarki yang netral.

Dalam konteks kebijakan luar negeri AS yang bersifat *xenophobic*, seperti *Muslim Ban*, pendekatan Wendt dapat membantu menjelaskan bagaimana persepsi AS terhadap negara-negara atau komunitas Muslim dikonstruksikan sebagai ancaman. Berdasarkan konstruktivisme ala Wendt, kebijakan seperti ini tercipta tidak semata-mata hanya karena ancaman itu nyata secara material, melainkan karena konstruksi identitas dan persepsi yang mewarnai pandangan AS terhadap dunia Islam.

Persepsi ancaman dari komunitas Muslim dibentuk oleh konstruksi sosial dalam masyarakat dan pemerintah AS yang menganggap identitas Muslim sebagai "berbeda" atau "berbahaya" bagi keamanan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan seperti *Muslim Ban* berakar dari identitas yang dikonstruksi secara sosial, yang mengarahkan pandangan AS untuk memandang komunitas Muslim melalui lensa kecurigaan dan ancaman, bukannya kemitraan atau diplomasi damai.

Rakyat sebagai Penguasa Politik

Dalam pandangan populis, "*the people*" atau rakyat didefinisikan bukan hanya sebagai sumber kekuatan politik, tetapi juga sebagai penguasa yang sah dalam sistem demokrasi modern. Rakyat dianggap memiliki hak penuh untuk menentukan arah politik dan kebijakan negara, serta berhak mengkritik atau bahkan memberontak terhadap elite yang dianggap telah mengkhianati kehendak mereka. Dalam situasi di mana rakyat merasa tidak terwakili dengan baik, mereka sering kali mengekspresikan ketidakpuasannya melalui gerakan populis yang menuntut kembalinya kekuasaan kepada rakyat. Elite, di sisi lain, seringkali didefinisikan sebagai kelompok kecil yang memegang kekuasaan di berbagai sektor seperti politik, ekonomi, media, dan seni. Kelompok ini dianggap beroperasi untuk kepentingan mereka sendiri dan bertentangan dengan "*general will*" atau kehendak umum rakyat (Henley, 2022).

Di berbagai belahan dunia, populisme mengambil bentuk yang berbeda sesuai dengan konteks politik dan sosialnya. Di Amerika Latin, populisme sayap kiri lebih sering dikaitkan dengan *clientelism*—hubungan patron-klien di mana pemimpin populis memberikan keuntungan kepada pendukungnya sebagai imbalan atas dukungan politik—serta mismanajemen ekonomi. Di sisi lain, populisme di Eropa, yang cenderung berada di spektrum sayap kanan, lebih fokus pada isu-isu seperti anti-imigran, nasionalisme, dan *xenophobia*. Populisme sayap kanan di Eropa sering kali muncul sebagai reaksi terhadap peningkatan imigrasi dan integrasi supranasional seperti Uni Eropa, yang dianggap mengancam kedaulatan nasional dan identitas budaya negara-negara Eropa (Henley, 2022).

Populisme Sayap Kanan dan Kebangkitan Partai-Partai Populis di Eropa

Populisme sayap kanan mulai mendapatkan perhatian besar di Eropa setelah kebangkitan Partai Front Nasional di Perancis yang dipimpin oleh Marie Le Pen pada pemilihan umum 2002. Partai ini memperoleh dukungan besar melalui retorika anti-imigran, anti-pluralisme, dan anti-kemapanan, serta berhasil menantang partai-partai politik yang sebelumnya dominan di Prancis. Fenomena ini tidak terbatas pada Prancis karena kebangkitan partai-partai Populis Sayap Kanan juga terjadi di berbagai negara Eropa lainnya. Di Austria, Partai Kebebasan (*Freedom Party*) yang dibentuk pada 1956 berhasil meraih 27 persen suara pada pemilihan umum 2017 dan membentuk koalisi pemerintahan. Di Belanda, Partai untuk Kebebasan (*Party for Freedom*) yang dibentuk pada 2006 memperoleh 15 persen suara pada pemilihan umum 2010 serta berperan dalam pembentukan koalisi di parlemen (Anditya, 2019).

Fenomena serupa juga dapat dilihat di negara-negara seperti Belgia, Jerman, Denmark, Italia, Norwegia, dan Swiss, di mana partai-partai Populis Sayap Kanan mendapatkan dukungan signifikan dari masyarakat yang merasa tidak terwakili oleh partai-partai politik tradisional. Selain di Eropa, populisme sayap kanan juga mengalami kebangkitan di luar benua tersebut, terutama dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada 2017. Kebijakan-kebijakan Trump yang penuh dengan retorika anti-imigran, proteksionisme, dan nasionalisme ekonomi dianggap sebagai contoh nyata dari Populisme Sayap Kanan di negara demokrasi besar. Kebangkitan Populisme Sayap Kanan juga terlihat di beberapa negara Asia, seperti India, Filipina, dan Jepang yang menunjukkan bahwa fenomena Populisme Sayap Kanan tidak terbatas pada konteks Eropa dan Amerika Utara saja (Anditya, 2019).

Karakteristik Ideologi Populisme Sayap Kanan

Partai-partai Populis Sayap Kanan seringkali menganut ideologi nasionalisme ekstrem yang terdiri dari tiga elemen utama, yaitu, nativisme, otoritarianisme, dan populisme. Nativisme adalah ideologi yang menggabungkan nasionalisme dan *xenophobia*, di mana negara dianggap harus dihuni oleh penduduk asli. Sebaliknya, orang asing atau kelompok dengan latar belakang etnis dan agama yang berbeda dianggap sebagai ancaman terhadap identitas dan integritas nasional. Otoritarianisme merujuk pada sistem pemerintahan yang tidak demokratis, di mana terdapat pengawasan ketat dan hukuman keras bagi mereka yang melanggar aturan. Dalam sistem ini, kebebasan sipil seringkali dibatasi demi menjaga "ketertiban" dan keamanan nasional. Populisme sebagai elemen ketiga membagi masyarakat menjadi dua kelompok besar, yaitu, "rakyat asli" yang dianggap memiliki moralitas dan nilai-nilai luhur, serta "elite korup"

yang dianggap telah mengkhianati rakyat dan hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri (Henley, 2002).

Dalam Populisme Sayap Kanan, kehendak umum rakyat asli dianggap sebagai yang paling penting, bahkan melebihi hak asasi manusia dan jaminan konstitusional. Ideologi ini menekankan bahwa kebijakan politik harus mencerminkan kepentingan dan kehendak rakyat asli, tanpa mengindahkan hak-hak minoritas atau kelompok yang berbeda. Hal ini menyebabkan populisme sayap kanan sering kali terlibat dalam retorika yang menentang imigrasi, pluralisme, dan multikulturalisme karena kelompok-kelompok tersebut dianggap sebagai ancaman terhadap identitas nasional. Secara keseluruhan, populisme sayap kanan berkembang dalam konteks ketidakpuasan publik terhadap elite politik, kebijakan imigrasi, dan globalisasi. Dengan mengklaim bahwa mereka mewakili "rakyat asli" dan memerangi "elite korup", maka partai-partai Populis Sayap Kanan telah berhasil meraih dukungan di banyak negara, meskipun seringkali menggunakan taktik yang membahayakan prinsip-prinsip demokrasi dan inklusivitas (Mudde, dkk, 2021).

Hasil analisis terhadap berbagai negara menunjukkan bagaimana variabel-variabel seperti persamaan ideologi, klaim pemimpin mewakili rakyat, dan penggunaan isu populis berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap kebijakan *Muslim Ban*. Kebijakan ini menjadi sorotan dalam konteks peningkatan populisme, khususnya sayap kanan, yang mengandalkan retorika anti-imigran dan ketakutan terhadap kelompok minoritas, termasuk Muslim. Di beberapa negara, pengaruh populisme terhadap kebijakan tersebut berbeda-beda, tergantung pada situasi sosial-politik, karakteristik populis, dan kebijakan imigrasi.

Amerika Serikat: Pengaruh Signifikan dari Klaim Pemimpin dan Persamaan Ideologi

Hasil analisis untuk Amerika Serikat menunjukkan bahwa semua variabel independen Partai Sayap Kanan AS yang dianalisis memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan *Muslim Ban*. Variabel-variabel tersebut meliputi persamaan ideologi, klaim pemimpin mewakili rakyat, dan penggunaan isu populis. Variabel yang paling menonjol adalah pengaruh klaim pemimpin yang mewakili rakyat. Klaim tersebut menunjukkan pengaruh positif terbesar dibandingkan variabel lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa retorika dari pemimpin populis yang dalam hal ini adalah presiden dan pejabat politik yang berkuasa, mampu mempengaruhi pandangan publik dan kebijakan pemerintah, khususnya dalam membatasi imigrasi Muslim.

Klaim pemimpin mewakili rakyat biasanya didasarkan pada narasi bahwa pemimpin berjuang untuk melindungi kepentingan "rakyat asli" atau mayoritas. Di Amerika Serikat, pemimpin seperti Donald Trump berhasil membangun narasi bahwa kebijakan imigrasi yang ketat, termasuk *Muslim Ban*, diperlukan untuk melindungi negara dari ancaman terorisme dan budaya asing yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Amerika. Pengaruh ini tidak hanya berakar pada pernyataan publik, tetapi juga direfleksikan dalam kebijakan resmi yang diimplementasikan.

Dua variabel lainnya, yakni, persamaan ideologi dan penggunaan isu populis, meskipun signifikan justru menunjukkan pengaruh negatif terhadap kebijakan tersebut. Persamaan ideologi yang mencerminkan masyarakat berbagi keyakinan nasionalis ekstremis ternyata tidak selalu mendukung kebijakan eksklusif seperti *Muslim Ban*. Hal ini mungkin terjadi karena ada sebagian masyarakat AS yang tetap mengedepankan nilai-nilai inklusif dan hak asasi manusia. Demikian pula, penggunaan isu populis yang sering kali berkaitan dengan retorika anti-

imigran. Meskipun signifikan, cenderung memperburuk persepsi negatif terhadap Muslim. Namun, tidak secara langsung meningkatkan dukungan terhadap kebijakan diskriminatif semacam ini.

Dari segi dampak, kebijakan *Muslim Ban* di AS telah meningkatkan ketegangan antar agama dan sosial, terutama dalam komunitas Muslim. Retorika pemimpin yang mengklaim mewakili suara mayoritas dapat memperkuat pandangan negatif terhadap komunitas Muslim, menciptakan suasana ketidakpercayaan, dan meminggirkan kelompok minoritas. Kebijakan ini juga memperburuk hubungan internasional dengan negara-negara mayoritas Muslim dan menimbulkan kritik dari berbagai kelompok hak asasi manusia.

Australia: Pengaruh Populisme yang Mendekati Signifikansi

Di Australia, hasil analisis menunjukkan bahwa hanya penggunaan isu populis Partai Sayap Kanan Australia yang mendekati signifikansi dalam mempengaruhi kebijakan *Muslim Ban*. Dua variabel lainnya, yakni klaim pemimpin mewakili rakyat dan persamaan ideologi, ternyata tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Hal ini mencerminkan bahwa di Australia, politik populis belum sepenuhnya berhasil mempengaruhi kebijakan terkait dengan Muslim, meskipun ada kecenderungan bahwa isu-isu populis yang diangkat oleh politisi dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan imigrasi.

Dalam konteks diskursus publik, politisi di Australia sering kali menggunakan isu-isu populis seperti imigrasi dan integrasi sosial untuk menarik perhatian pemilih. Meskipun pengaruhnya belum cukup kuat untuk mencapai signifikansi, retorika populis yang menyoroti ketakutan terhadap imigran Muslim dapat mempengaruhi kebijakan pada masa depan. Hal ini terlihat dari wacana publik yang semakin sering menghubungkan imigrasi Muslim dengan masalah keamanan dan ketidakkocokan budaya.

Meskipun demikian, dampak yang terlihat dari analisis ini menunjukkan bahwa masyarakat Australia mungkin masih terdikotomi dalam menerima kebijakan yang diskriminatif seperti *Muslim Ban*. Walaupun pengaruhnya tidak signifikan, penggunaan isu populis ini berpotensi menciptakan kecenderungan negatif terhadap komunitas Muslim dan dapat memengaruhi arah kebijakan imigrasi pada masa mendatang.

India: Kompleksitas Sosial dan Politik yang Membatasi Pengaruh Variabel

Di India, hasil analisis mengindikasikan bahwa tidak ada variabel independen Partai Sayap Kanan India yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kebijakan *Muslim Ban*. Kompleksitas sosial dan politik di India menjadi alasan utama mengapa variabel-variabel seperti persamaan ideologi, klaim pemimpin, dan penggunaan isu populis tidak memberikan dampak yang kuat terhadap kebijakan diskriminatif tersebut.

India adalah negara dengan populasi yang sangat beragam, baik itu dari segi agama, etnis, maupun bahasa. Hal ini membuat dinamika politik di India sangat kompleks sehingga dampak dari isu populisme terhadap kebijakan mungkin tidak sejelas di negara-negara lain. Masyarakat India terdiri dari berbagai kelompok, di mana dari berbagai kelompok tersebut memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang peran Muslim dalam masyarakat.

Tidak signifikannya ini mencerminkan bahwa masyarakat India memiliki pandangan yang lebih pluralistik terkait kebijakan *Muslim Ban*. Meskipun ketegangannya tetap ada, terutama lebih terasa di daerah-daerah yang mengalami polarisasi agama. Walau tidak signifikan, hasil

ini menunjukkan bahwa isu-isu seperti *Muslim Ban* di India memerlukan penanganan yang hati-hati. Karena, jika tidak maka dapat menciptakan ketegangan sosial yang lebih besar pada masa depan.

Denmark: Sikap Inklusif Mengurangi Pengaruh Populisme

Hasil analisis di Denmark menunjukkan bahwa semua variabel independen Partai Sayap Kanan Denmark yang dianalisis tidak signifikan dalam mempengaruhi kebijakan *Muslim Ban*. Hal ini menunjukkan bahwa Denmark memiliki pendekatan yang lebih inklusif terhadap imigrasi dan komunitas Muslim dibandingkan negara-negara lain yang dianalisis. Kebijakan imigrasi Denmark secara umum lebih moderat, meskipun ada peningkatan partai Populis Sayap Kanan dalam beberapa tahun terakhir.

Sebaliknya, sikap inklusif ini mungkin telah membantu menjaga kohesi sosial di Denmark, yakni mencegah retorika populis untuk memperoleh pengaruh yang signifikan dalam hal kebijakan diskriminatif terhadap Muslim. Meskipun tidak ada pengaruh signifikan yang ditemukan dalam analisis ini, tetap penting untuk memperhatikan dinamika politik pada masa depan. Alasannya, karena peningkatan sentimen populis dapat mempengaruhi kebijakan pada masa mendatang.

Hasil analisis komparatif ini menunjukkan bahwa populisme dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan diskriminatif seperti *Muslim Ban*, namun dampaknya bervariasi tergantung pada kondisi sosial-politik masing-masing negara. Di Amerika Serikat, populisme sayap kanan dengan klaim pemimpin mewakili rakyat memiliki pengaruh terbesar. Sementara itu, di Australia meskipun tidak signifikan, penggunaan isu populis dapat mempengaruhi kebijakan pada masa depan. Di India dan Denmark, kompleksitas sosial dan sikap inklusif tampaknya mengurangi pengaruh populisme terhadap kebijakan tersebut, meskipun ketegangan tetap mungkin muncul jika tidak ditangani dengan baik.

Keberhasilan Populisme dalam Mendorong Kebijakan *Muslim Ban* di Amerika Serikat

Amerika Serikat menjadi contoh utama bagaimana populisme berhasil mempengaruhi kebijakan, terutama dalam kasus *Muslim Ban*. Donald Trump, yang memenangkan pemilihan Presiden AS pada 2016, menggunakan strategi populis untuk menarik dukungan dari pemilih. Populisme Trump berakar pada retorika "kami vs. mereka", di mana ia menggambarkan dirinya sebagai perwakilan "rakyat sejati" melawan ancaman dari "elite yang korup" dan kelompok-kelompok luar, seperti imigran dan Muslim (Moffitt, 2016).

Hal ini terlihat jelas dalam kebijakan *Muslim Ban* yang diluncurkan pada awal masa kepresidenannya. Trump menjadikan kebijakan anti-imigrasi, termasuk larangan terhadap Muslim sebagai salah satu pilar kampanyenya yang tercermin dalam seruannya pada Desember 2015, seperti, "*a total and complete shutdown of Muslims entering the United States*". Retorika ini menarik perhatian sebagian besar pemilih yang merasakan ketakutan terhadap terorisme dan perubahan demografi akibat imigrasi. Dalam konteks populisme, kebijakan ini memperlihatkan Trump dalam menggunakan ketakutan terhadap Muslim sebagai dasar untuk melegitimasi kebijakan proteksionis yang eksklusif (Goodwin, M., & Eatwell, R., 2018).

Kemenangan Trump dalam Pemilu 2016 tidak hanya mencerminkan dukungan terhadap kebijakannya, tetapi juga menggambarkan strategi populisnya yang berhasil memobilisasi basis elektoral yang besar. Dengan retorika populis yang menekankan proteksionisme,

nasionalisme, dan eksklusivitas, Trump berhasil meraih kemenangan elektoral dengan basis pendukung yang merasa terpinggirkan oleh globalisasi dan perubahan ekonomi. *Muslim Ban* menjadi salah satu wujud konkret dari kebijakan proteksionis ini yang menargetkan negara-negara mayoritas Muslim yang diklaim Trump sebagai ancaman bagi keamanan nasional AS. Setelah dilantik pada 2017, Trump menandatangani perintah eksekutif yang dikenal sebagai *Muslim Ban*. Perintah ini melarang perjalanan dari tujuh negara mayoritas Muslim: Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman. Meskipun kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan hukum di pengadilan, Mahkamah Agung AS akhirnya mengesahkan versi revisi dari larangan tersebut pada 2018. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan populis Trump tidak hanya sebatas retorika, tetapi juga berhasil diterapkan secara hukum. Fakta ini memberikan bukti nyata keberhasilan populisme di Amerika (Hawly, G. 2019).

Survei yang dilakukan oleh *Pew Research Center* pada 2017 menunjukkan bahwa lebih dari separuh pemilih Partai Republik mendukung kebijakan *Muslim Ban*, meskipun kebijakan ini menimbulkan kontroversi di dalam maupun di luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa retorika populis yang dibawa Trump, terutama dalam isu imigrasi, berhasil mengumpulkan dukungan elektoral yang signifikan (Hawly, G. 2020).

Muslim Ban dianggap sebagai tindakan yang diperlukan untuk melindungi AS dari ancaman terorisme dan imigrasi ilegal, meskipun banyak yang mengkritisi kebijakan ini sebagai bentuk diskriminasi terhadap Muslim. Populisme Trump juga sangat dipengaruhi oleh penggunaan media sosial, terutama *Twitter*, yang menjadi sarana efektif untuk menyebarkan pesan-pesan populisnya. Trump menggunakan *Twitter* untuk memobilisasi pendukungnya, mengkritik media mainstream, dan memperkuat narasi bahwa dirinya adalah satu-satunya pelindung "rakyat sejati" dari ancaman imigran dan Muslim. Penggunaan media sosial sebagai alat propaganda populis memungkinkan Trump membangun hubungan langsung dengan basis pendukungnya tanpa harus bergantung pada media tradisional yang sering dianggapnya sebagai bagian dari "elite korup" (Velasco, 2020).

Dalam konteks kebijakan *Muslim Ban*, populisme Trump dapat dikatakan berhasil karena ia mampu menerapkan kebijakan yang sejalan dengan janji-janji kampanyenya dan mengubahnya menjadi tindakan nyata yang didukung oleh basis pendukungnya. Kebijakan ini memberikan citra bahwa Trump adalah pemimpin yang tegas, berani, dan siap mengambil keputusan kontroversial untuk melindungi AS meskipun kebijakan tersebut banyak dikritisi di tingkat internasional.

Komparasi Amerika Serikat dengan Negara Lain: Australia, India, dan Denmark

Berbeda dengan Amerika Serikat, negara-negara lain seperti Australia, India, dan Denmark menunjukkan variasi dalam penerapan kebijakan populis terkait imigrasi dan pengaruh populisme terhadap kebijakan-kebijakan anti-imigrasi atau terkait Muslim. Australia memiliki kebijakan imigrasi yang ketat dan dikenal dengan pendekatan kerasnya terhadap pencari suaka, terutama melalui kebijakan *Offshore Processing* dimana pencari suaka dikirim ke kamp-kamp di luar wilayah Australia (Australian Government, 2020).

Dalam hal ini, meskipun Australia menerapkan kebijakan imigrasi yang ketat, retorika populis anti-Muslim tidak terlalu dominan. Pemimpin-pemimpin Australia cenderung menekankan masalah keamanan dan kebijakan perbatasan yang ketat tanpa menggunakan

retorika populis yang menargetkan Muslim secara spesifik. Hal ini membuat populisme anti-Muslimnya di Australia tidak sebesar di AS meskipun kebijakan imigrasinya sama ketatnya.

Di India, populisme juga berkembang pesat, terutama di bawah pemerintahan Narendra Modi. Namun, kebijakan populis Modi lebih berfokus pada isu-isu nasionalisme Hindu dan eksklusivitas agama daripada kebijakan anti-imigrasi yang eksplisit seperti *Muslim Ban* di AS. Misalnya, melalui Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (CAA), pemerintah India memfasilitasi kewarganegaraan bagi imigran dari negara-negara tetangga, kecuali Muslim (BBC News, 2019). Hal ini mengindikasikan bentuk populisme berbasis agama yang berbeda dari populisme Trump yang berbasis pada isu keamanan dan terorisme terkait Muslim.

Sedangkan di Denmark, retorika populis anti-imigrasi telah lama menjadi bagian dari politik, terutama dengan munculnya partai-partai sayap kanan seperti Partai Rakyat Denmark (*Danish People's Party*). Namun, kebijakan terkait imigrasi Muslim di Denmark lebih difokuskan pada integrasi sosial dan kontrol perbatasan daripada larangan perjalanan secara eksplisit seperti yang terjadi di AS. Kebijakan imigrasi Denmark lebih bersifat domestik yang difokuskan pada pengurangan jumlah imigran dan memperketat proses integrasi (Overseas Development Institute, 2023). Meskipun terdapat populisme di Denmark, pendekatannya lebih pragmatis dibandingkan dengan pendekatan drastis seperti *Muslim Ban* di AS.

Dalam studi komparatif kebijakan *Muslim Ban* antara Amerika Serikat, Australia, India, dan Denmark, terlihat bahwa populisme memainkan peran yang berbeda dalam mempengaruhi kebijakan di masing-masing negara. AS di bawah pemerintahan Trump menunjukkan keberhasilan paling jelas dari kebijakan populis yang ditopang oleh retorika anti-Muslim yang kuat. Sementara itu, Australia, India, dan Denmark menunjukkan penerapan kebijakan populis dengan nuansa yang berbeda, di mana kebijakan terkait Muslim lebih dibingkai dalam isu-isu domestik, seperti, keamanan, kewarganegaraan, dan integrasi sosial.

KESIMPULAN

Hasil analisis komparatif pada Amerika Serikat, Australia, India, dan Denmark menunjukkan adanya perbedaan dalam dampak populisme terhadap kebijakan luar negeri yang diskriminatif dalam konteks global dan lokal terkait *Muslim Ban*.

Di AS, semua variabel independen Partai Sayap Kanan yang diuji, persamaan ideologi, klaim pemimpin mewakili rakyat, dan penggunaan isu populis berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu kebijakan *Muslim Ban*. Dalam hal ini, klaim pemimpin yang mewakili rakyat memiliki pengaruh terbesar. Temuan ini mengindikasikan bahwa retorika pemimpin populis memainkan peran penting dalam mempengaruhi kebijakan anti-imigran.

Di Australia, penggunaan isu populis hampir signifikan dalam mempengaruhi kebijakan meskipun dampaknya belum cukup kuat. Temuan ini menunjukkan bahwa politisi populis di Australia dapat memanfaatkan isu-isu sensitif untuk mempengaruhi persepsi publik, namun efeknya belum dominan.

Sementara itu, di India dan Denmark, variabel-variabel populisme tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Kompleksitas sosial-politik di India menyebabkan adanya pandangan masyarakat yang lebih beragam, sehingga tidak ada variabel independen yang mampu memberikan dampak kuat terhadap kebijakan *Muslim Ban*. Di Denmark, sikap yang lebih inklusif terhadap imigrasi dan komunitas Muslim tampaknya membatasi pengaruh populisme dalam mempengaruhi kebijakan diskriminatif.

Secara keseluruhan, meskipun populisme dapat memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan imigrasi, dampaknya sangat bergantung pada konteks sosial-politik setiap negara. Di negara-negara dengan dinamika populis yang kuat seperti Amerika Serikat, retorika populisme dapat memperburuk ketegangan sosial dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Sebaliknya, negara-negara dengan kebijakan yang lebih inklusif seperti Denmark tampaknya lebih mampu menjaga kohesi sosial meskipun populisme berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- A, L. (1956). Comparative Politics and the Comparative Method. *The American Political Science Review*, 662-693.
- Anditya, N. R. (2019). Populisme Sayap Kanan di Negara-Negara Demokratis: Kembalinya Yang-Politis. *Institute Of International Studies*.
- Australian Government-Department of Home Affairs. (2020). Australia's offshore processing policy.
- BBC. (2019, December 17). BBC. Retrieved from BBC Web Site: <https://www.bbc.com/news/world-europe-42379985>.
- BBC News. (2019, December 10). *Citizenship Amendment Bill: India's new 'anti-Muslim' law explained*. BBC. <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50670393>.
- Cas Mudde. (2004). The populist zeitgeist. *European Journal of Political Research*, 39(6), 541-563.
- Cas, M., & Cristobal, K. (2017). *Populism : A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press.
- Erbas, I. (2022). Constructivist Approach in Foreign Policy and in International Relations. *Journal of Positive School Psychology*, 6(3), 5087–5096.
- Goodwin, M., & Eatwell, R. (2018). National populism: The revolt against liberal democracy. Penguin Random House.
- Henley, J. (2002, April 22). *The Guardian*. Retrieved from The Guardian Web Site: <https://www.theguardian.com/world/2002/apr/22/thefarright.france>.
- Hawly, G. (2019, July 24). Ambivalent nativism: Trump supporters' attitudes toward Islam and Muslim immigration. *Brookings Edu*. Site: <https://www.brookings.edu/articles/ambivalent-nativism-trump-supporters-attitudes-toward-islam-and-muslim-immigration/>
- Iskandar, R., Ambarwati, & Putra, M. I. T. (2022). Analisis Strategi Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Belt and Road Initiative. *Jurnal Dinamika Global*, 7(1), 1-25
- Moffitt, B. (2016). The global rise of populism: Performance, political style, and representation. Stanford University Press.
- Mukaromah, Z., Muzani, & Zid, M. (2022). Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat terhadap Migran (Muslim). *Jurnal Mercatoria*, 15(2), 73-84
- Norris, P., & Inglehart, R. (2019). Cultural backlash: Trump, Brexit, and authoritarian populism. Cambridge University Press.
- Overseas Development Institute. (2023, January 18). *The rise of the far right in Denmark and Sweden and why it's vital to change the narrative on immigration*. ODI.

- Our World In Data. (2024, May 22). *Our World In Data*. Retrieved from Our World In Data Web Site: <https://ourworldindata.org/grapher/democracy-index-eiu?tab=chart&time=2017..2021®ion=Europe&country=USA~AUS~IND~DNK>.
- Puspaningrum, B. A. (2021, November 10). *Kompas*. Retrieved from Internasional Kompas Website:
https://www.setneg.go.id/baca/index/paparkan_tantangan_global_umat_islam_dewasa_ini.
- Ray, M. (2024, 5 3). *Britannica*. Retrieved from Britannica Web Site:
<https://www.britannica.com/topic/Party-for-Freedom>.
- Sakinah, K. (2020, December 15). *Republika*. Retrieved from Republika Khazanah Web Site:
<https://khazanah.republika.co.id/berita/qld9yu366/denmark-akan-pisahkan-klasifikasi-imigran-muslim>.
- Sebayang, R. (2019, December 15). *CNBC Indonesia*. Retrieved from CNBC Indonesia Web Site: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191215141520-4-123217/india-rusuh-geger gegara-uu-anti-muslim-ini-isinya>.
- TribunNews. (2019, September 18). *Tribun*. Retrieved from Tribunnews web site:
<https://www.tribunnews.com/australia-plus/2016/09/18/pelarangan-imigran-dari-negara-ekstrimis-ke-australia>.
- Velasco A. (2020). Populism and Identity Politics. LSE Public Policy Review. 1(1), 1-8. DOI:
<https://doi.org/10.31389/lseppr.1>

BIOGRAFI

Marsaa Anindita, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Brawijaya
Adhi Cahya Fahadayna, pengajar dan peneliti di Departemen Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Hubungan Internasional, Universitas Brawijaya.